

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

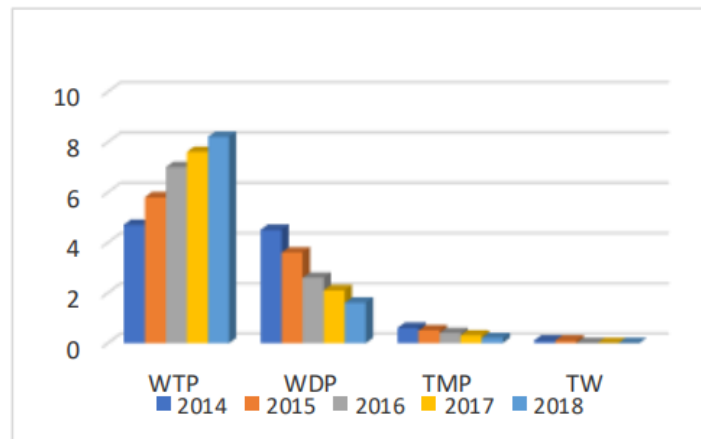
Bedasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan otonomi daerah, yang mana daerah otonomi diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia berharap dengan adanya penerapan otonomi daerah ini maka tercipta daerah yang mandiri dan dapat meningkatkan efesiensi, efektivitas serta meningkatkan akuntabilitas hingga mencapai *good goverment*. Pemerintah daerah yang memiliki potensi didaerahnya dapat mengambil suatu keputusan secara langsung dalam mengelola potensi yang ada guna memajukan dan mensejahterakan masyakat di daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah ini memicu daerah-daerah untuk bersaing guna membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan untuk membangun daerahnya masing-masing.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan yang didirikan pemerintah memiliki fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan melalui proses audit, berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken, 2007).

Dari proses pemeriksaan yang dilakukan BPK akan menghasilkan opini dan sejumlah temuan-temuan yang terjadi selama proses pemeriksaan. Temuan-temuan tersebut, merupakan suatu bukti adanya penyimpangan yang terjadi. Hal ini juga diperkuat dari penelitian Liestiani (2008) yang menjelaskan bahwa hubungan jumlah temuan audit positif dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

Oleh sebab itu, BPK selaku badan yang melakukan pemeriksaan melalui proses audit menjadi sorotan dan menuai berbagai kritik, karena beberapa instasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga lembaga dan badan

yang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan, masih terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat instansi tersebut. Opini WTP yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : BPK-RI melalui publikasi tahun 2018 [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

**Gambar 1.1**  
**Grafik Perkembangan Opini LKPD 2014-2018**

Dalam grafik (gambar 1.1), LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (TMP) mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan 4 poin persen (dari 6% menjadi 2%)

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD memuat sejumlah temuan setiap temuan yang ditemukan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. BPK selalu mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dengan memantau tindak lanjut hasil temuan audit. Kualitas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan akan meningkat jika tindak lanjut hasil temuan audit berjalan efektif. Peningkatan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurut BPK disebabkan

pemerintah daerah melakukan perbaikan-perbaikan kelemahan pada LKPD tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang tersaji dalam LKPD, terhadap opini audit BPK merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Pemerintah daerah masih memiliki permasalahan mengenai pengelolaan aset daerah, dana perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja dalam mencapai target opini WTP. BPK juga masih menemukan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam menindak lanjuti hasil temuan audit. BPK merekomendasikan kepada kepala daerah untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Karakteristik pemerintah daerah diwakili oleh kekayaan, ukuran, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pemerintah pusat berdasarkan penelitian Nuraeni dan Martani (2012). Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit namun mempunyai korelasi negatif Setyaningrum (2012); dan Habib (2013) ukuran organisasi berhubungan negatif dengan kualitas audit yang berarti mempunyai korelasi positif dengan opini audit. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap opini (Nuraeni dan Martani, 2012) sedangkan menurut Ingram dalam Martani dan Lestiani (2012) bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi kepada pemerintah pusat akan membuat daerah mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku akan meningkatkan opini audit. Kekayaan pemerintah daerah yang diukur dari PAD tidak berpengaruh terhadap opini audit (Nuraeni dan Martani, 2012) sedangkan menurut Mustikarini dan Fitriyani (2012) kekayaan daerah berpengaruh pada tingkat pengungkapan pada laporan keuangan. Pendapatan yang besar menuntut pertanggung jawaban yang tinggi dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berhati-hati dalam mengelola PAD. Nurdiono (2014) menemukan bahwa belanja publik berpengaruh secara terhadap opini audit namun pada penelitian Safitri (2014) besarnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja tidak berpengaruh terhadap opini audit. Belanja yang besar mencerminkan jumlah dan kompleksitas kegiatan pemerintah daerah jika tidak dikelola secara

hati-hati akan menyebabkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan sehingga menurunkan opini audit.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit ?
2. Apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit ?
3. Apakah tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit?
4. Apakah tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit?
5. Apakah Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, Tingkat belanja pemerintah daerah dan Opini audit pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2008–2018. Penelitian ini dilakukan terhadap laporan hasil pemeriksaan audit keuangan BPK Republik Indonesia.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah untuk menguji dan mengetahui :

1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit

2. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit
3. Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit
4. Pengaruh Tingkat Belanja Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit
5. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Tingkat Belanja Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mata kuliah audit sector publik, serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan baik.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi, dan dapat menjadikan masukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar dapat memperthankan dan memperbaiki hasil opini audit.

3. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan di bidang audit sector publik.